

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jambi

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan penjabaran Program Pembangunan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun dengan mempertimbangkan keadaan, termasuk keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Dokumen Renstra diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi 2025 - 2029 ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja tahunan (Renja OPD), agar prioritas pembangunan yang termuat ke dalam program dan kegiatan menjadi lebih fokus aksinya. Dokumen Renstra yang telah disusun agar dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi, pembinaan dan pengawasan ormas serta fasilitasi pembinaan politik di provinsi Jambi.

Jambi, 15 Oktober 2025
KEPALA BADAN

Drs. H. ISMED WIJAYA , M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana 17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 28

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.6 Isu Strategis 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 42

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 42

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

4.1 Rencana Program 45

4.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan 45

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 64

BAB V PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (data Desember 2024)	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Esselonering (data Desember 2024)	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Jenis Pendidikan Terakhir (data Desember 2024)	18
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Menurut Jenis Golongan (data Desember 2024)	19
Tabel 2.5	Rekapitulasi Barang Inventaris Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (data Desember 2024)	19
Tabel 2.6	Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangpol Provinsi Jambi	20
Tabel 2.7	Rencana Pemeliharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	20
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	24
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	34
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 2025-2029	42
Tabel 3.12	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	43
Tabel 4.13	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	52

Tabel 4.14 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 63
Tabel 4.15 Indikator Kerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi 65
Tabel 4.16 Indikator Kinerja Kunci 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas Pokok "***Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik"*** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Perda tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dalam proses penetapan.

Renstra Perangkat Daerah memuat indikator, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum RENSTRA 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil

verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 Tentang RPJMD 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat indikator program, kegiatan, sub kegiatan dan target serta pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada Rancangan RPJMD. Tujuan disusunnya Rencangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan serta isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja perangkat daerah.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Partisipasi Politik
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.
5. Bidang Penanganan Konflik

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk dapat merealisasikan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :
   (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badang Kesatuan bangsa dan Politik;
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempuntai fungsi :
      a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
      b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
      c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
      d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan badan Kesbangpol;
d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan

(1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;

d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengsistimasikan data dan penyusun rencana serta program kerja;
b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

(1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;

b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
f. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

(1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
    a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan pertisipasi politik;
    b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
    c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
    d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub Bidang Budaya Politik

(1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
b. Melaksanakan penyiapan nahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
   (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembagan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
      a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
      b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
      c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
      d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;

e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

(1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan

(1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
b. Melaksanakan kebiajakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

(1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dnegan kegiatan partai politik;
d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

(1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;

b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;
c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik
   (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
      a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
      b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
      c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
      d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
      e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
      f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

(1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang konflik Pemerintah dan Keamanan

(1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.

b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) per Desember 2024 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 16 Orang
2. Staf/Pelaksana 25 Orang
3. Tenaga Non ASN 33 Orang

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
(data Desember 2024)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			HONORER			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat	6	5	11	3	7	10	21
2.	Bidang Partisipasi Politik	4	4	8	2	2	4	12
3.	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	6	1	7	2	5	7	14
4.	Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasya & Lembaga Perwakilan	8	2	10	2	4	6	16
5.	Bidang Penanganan Konflik	2	3	5	3	3	6	11
	Jumlah	26	15	41	12	21	33	74

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2024

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Esselonering
(data Desember 2024)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1.	II	1	-	-	-	1	
2.	III	4	-	-	-	4	
3.	IV	9	2	-	-	11	
	Jumlah	14	2	-	-	16	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2024

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir ASN
(data Desember 2024)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	11	1	12	
2.	S 1	12	12	24	
3.	D 3	-	2	2	
4.	SLTA	2	1	3	
	Jumlah	25	16	41	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2024

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Menurut Jenis Golongan
(data Desember 2024)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	4	-	6	-	-	-	1	-	11
2	III	2	1	4	1	2	4	6	9	29
3	II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	6	1	10	1	2	4	8	9	41

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Desember 2024

Selanjutnya, sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan juga didukung oleh sumber daya sarana prasarana yang memadai, seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Inventaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2024)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				B	KB
I	Tanah dan Bangunan	15,21	M2		
II	KENDARAAN :				
	1.Roda 2	14	UNIT	10	4
	2.Roda 4	8	UNIT	6	2
III	Alat Perlengkapan Kantor :				
	1.Lemari Kayu	25	BUAH	18	7
	2.Filling Kabinet	8	BUAH	5	3
	3.Papan Tulis	4	BUAH	4	-
	4.Kursi Putar	45	BUAH	37	8
	5.Kursi Biro	7	BUAH	7	-
	9.Meja Biro	14	BUAH	10	4
	10.Meja ½ Biro	40	BUAH	23	17
	11.Televisi	7	UNIT	7	-
	12.Bagan Struktur	1	BUAH	1	-
	13.Komputer (PC)	14	UNIT	11	3
	14.Laptop	12	UNIT	10	2
	15.AC	25	UNIT	19	6
	16.Infocus	1	UNIT	1	-
	17.Printer	17	UNIT	12	5

Tabel 2.6
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2024)

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pengadaan 2024	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB		
1	AC 2 Pk	3	-	1	3
2	AC 1 Pk	3	-	1	3
3	Filling Kabinet	2	-	2	2
4	Kursi Kantor	35	-	18	35
5	Pc Al In One	2	-	2	2
6	Laptop	2	-	2	2
7	Printer G4010	2	-	2	2
8	Printer Epson	2	-	2	2
9	Printer Canon G2010	4	-	4	4
10	Kursi Pimpinan	1	-	1	1
11	Meja Kerja	5	-	5	5

Tabel 2.7
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2024)

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pemeliharaan 2024	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB		
1	Minibus	8	2	8	8
2	Bangunan/Gedung Kantor	1	-	1	1
3	AC	19	6	9	25
4	PC (Komputer)	14	3	14	17
5	Printer	14	3	17	17

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008

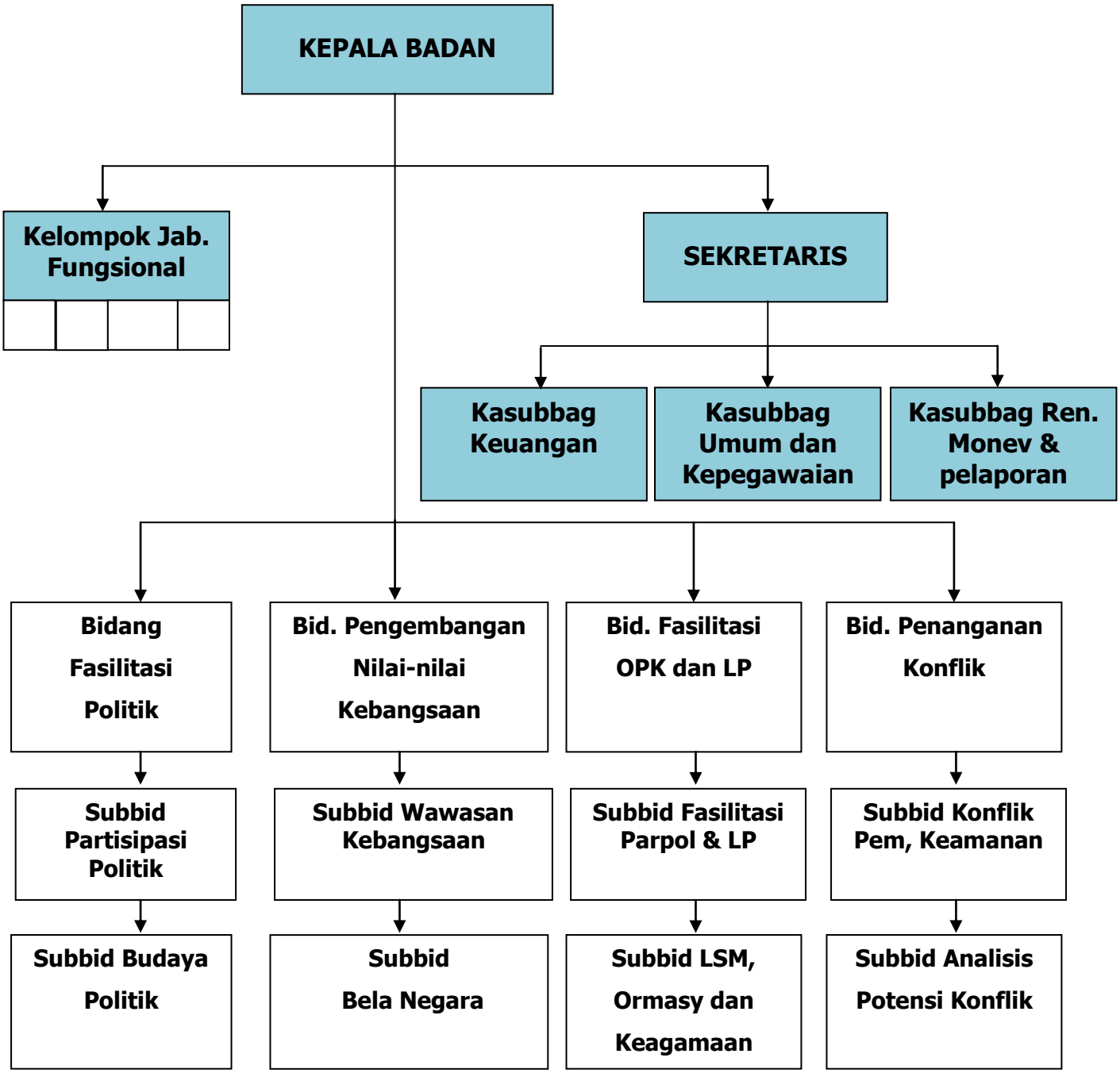

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja jumlah anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi Periode Tahun 2020 – 2024 tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya predikat SAKIP	-	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Kebebasan Diskriminasi	-	-	-	93,47	93,47	93,60	93,80	94,05	93,47	93,47	93,60	93,80	94,05	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersusunnya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	75 %	75 %	85 %	90 %	92 %	75 %	75 %	85 %	90 %	92 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pelaksanaan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	76 %	76 %	79 %	80 %	81 %	76 %	76 %	79 %	80 %	81 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	78 %	78 %	78 %	80 %	83 %	78 %	78 %	78 %	80 %	83 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	-	77 %	77 %	77 %	79 %	81 %	77 %	77 %	77 %	79 %	81 %	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi periode 2020 – 2024 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti :

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak, baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlihat.
2. Kondusifitas Pemerintah Provinsi Jambi yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Provinsi Jambi.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	**4.345.217.933**	**14.481.095.341**	**19.275.341.535**	**102.378.640.807**	**163.816.816.233**	**4.075.677.542**	**13.537.411.507**	**19.211.662.651**	**100.531.127.002**	**162.611.646.554**	**93,79**	**93,48**	**99,66**	**98,20**	**99,26**	**60.859.370**	**96,88**
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**9.150.601.066**	**9.538.293.485**	**10.037.947.603**	**9.497.244.233**	**-**	**8.263.538.213**	**9.190.091.884**	**9.624.263.358**	**8.605.839.888**	**-**	**90,30**	**96,34**	**95,88**	**90,61**	**7.644.817.277**	**74,63**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**189.248.055**	**251.210.060**	**207.246.220**	**175.000.000**	**-**	**186.205.992**	**244.678.437**	**206.377.579**	**169.237.134**	**-**	**98,39**	**97,39**	**99,58**	**96,71**	**164.540.867**	**78,41**
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.616.000	36.985.000	84.200.000	46.736.500	15.072.000	25.568.000	35.070.969	83.704.300	45.886.173	14.178.820	99,81	94,82	99,41	98,18	94,07	41.721.900	97.26
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.684.000	152.263.055	167.010.060	160.509.720	159.928.000	107.842.400	151.135.023	167.974.137	160.491.406	155.068.814	98,32	99,25	96,39	99,99	96,96	149.878.967	98,18
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**7.646.668.521**	**7.768.276.223**	**7.387.707.572**	**7.827.752.492**	**-**	**6.774.450.375**	**7.437.819.000**	**6.991.788.635**	**6.998.697.875**	**-**	**88,59**	**95,74**	**94,64**	**89,41**	**6.126.080.962**	**73,68**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	7.383.705.116	7.497.812.856	7.238.857.572	7.684.266.827	-	6.511.487.883	7.164.359.433	6.842.946.875	6.857.550.591	-	88,19	95,55	94,53	89,24	5.960.928.474	73,50
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.604.000	262.963.405	270.463.367	148.850.000	143.485.665	92.604.000	262.962.492	270.459.956	148.841.760	141.147.284	88,53	100	100	99,99	98,37	186.073.287	97,38
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD**	**-**	**70.178.000**	**17.656.000**	**38.500.000**	**89.000.000**		**70.178.000**	**17.656.000**	**38.500.000**	**77.110.000**	**-**	**100**	**100**	**100**	**86,64**	**43.066.800**	**77,33**
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannnya	48.750.000	48.100.000	-	-	52.000.000	48.750.000	48.100.000	-	-	52.000.000	100	100	100	-	100	29.770.000	80,00
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	22.078.000	17.656.000	38.500.000	37.000.000	-	22.078.000	17.656.000	38.500.000	25.110.000	-	100	100	100	67,86	23.046.800	73,57
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**430.113.035**	**628.444.299**	**631.520.481**	**318.939.558**	**-**	**428.936.754**	**624.202.870**	**631.067.264**	**317.258.456**	**-**	**99,72**	**99,32**	**99,93**	**99,48**	**401.803.475**	**79,69**
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.035.000	25.804.236	175.804.236	172.385.781	29.901.548	25.035.000	25.796.090	174.643.624	171.935.881	29.901.450	100	99,97	99,34	99,74	100	85.786.160	99,81
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	28.200.000	49.550.000	49.550.000	51.244.600	43.350.000	28.200.000	48.388.500	46.543.000	51.243.100	43.350.000	100	97,66	99,93	100	100	44.378.920	99,52
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.383.000	50.486.250	42.446.000	60.600.500	47.310.000	50.383.000	50.486.201	42.387.000	60.600.500	45.675.000	100	100	99,86	100		50.245.150	79,97
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	14.109.240	14.081.496	9.000.000	14.000.000	10.000.000	14.109.240	14.081.496	9.000.000	14.000.000	100	100	100	100	100	12.238.147	100
1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.777.268	290.163.309	346.562.567	338.289.600	184.377.910	173.547.300	290.156.723	346.547.750	338.287.783	184.342.006	99,87	100	100	100	99,98	266.634.131	99,97
1.5	**Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**123.468.625**	**123.214.073**	**234.377.860**	**154.938.831**	**-**	**123.456.000**	**123.211.500**	**232.167.600**	**144.784.000**	**-**	**100**	**100**	**99,06**	**93,45**	**127.199.878**	**78,50**
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.352.904	123.468.625	123.214.073	234.377.860	154.938.831	163.131.250	123.456.000	123.211.500	232.167.600	144.784.000	99,86	100	100	99,06	93,45	159.870.459	98,47
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**181.178.830**	**174.578.830**	**368.422.670**	**506.650.562**	**-**	**177.412.942**	**174.103.680**	**365.102.053**	**498.290.347**	**-**	**97,92**	**99,72**	**99,10**	**98,35**	**246.166.178**	**79,02**
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.900.000	27.000.000	5.400.000	5.000.000	5.550.000	18.900.000	27.000.000	5.400.000	5.000.000	5.545.000	100	100	100	100	99,91	12.370.000	99,98
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.350	104.335.264	119.335.264	176.008.548	200.593.742	111.672.588	104.335.264	119.333.274	173.666.123	197.611.471	63,81	96,40	100	98,67	98,51	155.054.634	91,48
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.576.000	49.843.566	49.843.566	187.414.122	300.506.820	196.570.000	49.835.440	49.370.406	186.435.930	295.133.876	99,99	99,98	99,05	99,48	98,21	156.836.815	99,34
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**509.746.000**	**574.914.000**	**1.170.172.800**	**424.962.790**	**-**	**502.898.150**	**571.420.008**	**1.159.260.227**	**400.452.076**	**-**	**98,65**	**99,39**	**99,07**	**94,23**	**535.959.118**	**78,27**
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	216.400.000	238.460.000	229.880.000	359.809.600	268.970.000	208.890.200	231.708.150	226.610.000	351.060.317	288.947.848	96,53	97,17	98,57	97,57	99,99	262.903.920	97,97

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
1.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.700.000	87.090.000	78.800.000	109.139.600	39.500.000	45.700.000	87.090.000	78.800.000	109.071.050	39.367.032	100	100	100	99,94	99,66	72.045.920	99,92
1.4.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.097.000	184.196.000	266.234.000	701.223.600	116.492.790	80.186.000	184.100.000	266.010.008	699.128.860	92.137.196	97,67	99,95	99,92	99,70	79,09	270.048.678	95,27
2	***PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN***	**-**	**490.973.385**	**713.357.160**	**9.623.944.150**	**4.990.172.000**	**-**	**488.958.091**	**709.951.092**	**8.680.211.262**	**4.808.758.495**	**-**	**99,58**	**99,52**	**90,19**	**96,36**	**3.163.689.339**	**77,13**
2.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**-**	**490.973.385**	**713.357.160**	**9.623.944.150**	**4.990.172.000**	**-**	**488.958.091**	**709.951.092**	**8.680.211.262**	**4.808.758.495**	**-**	**99,58**	**99,52**	**90,19**	**96,36**	**3.163.689.339**	**77,13**
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	199.839.200	-	-	3.691.016.987	3.754.554.400	**192.360.100**	-	-	**3.670.005.648**	**3.745.352.006**	**96,25**	-	-	**99,43**	**99,75**	**1.529.082.117**	**59,09**
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	19.278.800	309.621.833	287.365.000	5.823.680.008	1.067.911.320	19.278.800	309.555.962	285.211.582	4.901.574.831	916.022.880	100	99,98	99,25	84,17	85,78	1.501.571.392	93,84
2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	246.453.550	181.351.552	425.992.160	109.247.155	167.706.280	241.676.550	179.402.129	424.739.510	108.630.783	147.383.610	98,06	98,93	99,71	99,44	87,88	226.150.139	96,80
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**2.494.988.000**	**5.782.737.400**	**78.438.123.004**	**146.281.400.000**	**-**	**2.491.192.044**	**5.781.117.768**	**78.434.008.454**	**146.249.395.492**	**-**	**99,84**	**99,97**	**99,99**	**99,98**	**46.599.449.681**	**79,96**
3.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**-**	**2.494.988.000**	**5.782.737.400**	**78.438.123.004**	**146.281.400.000**	**-**	**2.491.192.044**	**5.781.117.768**	**78.434.008.454**	**146.249.395.492**	**-**	**99,84**	**99,97**	**99,99**	**99,98**	**46.599.449.681**	**79,96**
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	-	2.131.265.840	5.272.969.880	78.111.801.000	145.660.720.800	-	2.130.810.000	5.272.788.200	78.111.801.000	145.636.549.592	-	99,98	100	100	99,98	46.235.351.504	79,99
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	352.745.250	247.890.380	446.495.340	291.481.764	560.457.700	251.072.436	245.942.276	445.067.222	289.121.972	557.017.400	99,52	99,03	99,68	99,19	99,39	379.814.087	99,36
3.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik di Daerah	322.425.506	115.831.780	63.272.180	34.840.240	60.221.500	316.678.000	114.889.768	63.262.346	33.085.482	55.828.500	98,21	99,19	99,98	94,96	92,71	119.318.241	97,01

4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**597.524.320**	**921.000.000**	**1.680.000.000**	**1.222.000.000**	**-**	**596.216.624**	**918.357.532**	**1.650.930.920**	**1.201.786.942**	**-**	**99,78**	**99,71**	**98,27**	**98,35**	**884.104.864**	**79,22**
4.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**-**	**597.524.320**	**921.000.000**	**1.680.000.000**	**1.222.000.000**	**-**	**596.216.624**	**918.357.532**	**1.650.930.920**	**1.201.786.942**	**-**	**99,78**	**99,71**	**98,27**	**98,35**	**884.104.864**	**79,22**
4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	113.728.960	137.150.000	112.932.586	247.583.200	-	112.652.800	136.385.866	112.919.800	231.466.592	-	99,05	98,67	99,99	93,49	122.278.949	78,24
4.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.087.779.005	368.635.200	668.650.000	1.482.986.834	929.570.000	1.078.668.255	368.634.270	666.895.833	1.454.980.584	925.563.550	99,16	100	99,64	98,11	99,57	907.524.208	99,30
4.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	-	115.160.160	115.200.000	84.080.000	44.846.800	-	114.929.554	115.075.833	83.030.536	44.846.800	-	99,80	99,99	98,75	100	71.857.392	79,71
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**482.148.590**	**636.000.080**	**331.067.050**	**336.000.000**	**-**	**477.250.200**	**632.997.914**	**330.045.550**	**322.919.400**	**-**	**98,98**	**99,52**	**99,69**	**96,11**	**357.043.144**	**78,86**
5.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang KetahananEkonomi, Sosial dan Budaya**	**-**	**482.148.590**	**636.000.080**	**331.067.050**	**336.000.000**	**-**	**477.250.200**	**632.997.914**	**330.045.550**	**322.919.400**	**-**	**98,98**	**99,52**	**99,69**	**96,11**	**357.043.144**	**78,86**
5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.679.000	91.035.040	90.000.000	75.389.660	247.219.560	34.495.900	90.993.300	88.804.992	74.869.190	240.187.100	94,04	99,95	98,67	99,31	97,16	108.064.652	97,83
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	224.375.000	341.790.370	506.000.000	255.677.390	88.780.440	221.226.581	336.940.520	504.197.342	255.176.360	82.732.300	98,60	98,58	99,64	99,80	93,19	283.324.640	97,96
5.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	49.323.180	40.000.000	-	-	-	49.316.380	39.995.580	-	-	-	99,99	99,99	-	-	17.864.636	40,00
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**1.264.859.980**	**1.989.800.000**	**2.267.559.000**	**1.490.000.000**	**-**	**1.227.327.220**	**1.979.146.461**	**2.141.713.008**	**1.422.856.337**	**-**	**97,03**	**99,46**	**94,45**	**95,49**	**1.402.443.796**	**77,29**
77,29 6.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan KewaspadaanNasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**-**	**1.264.859.980**	**1.989.800.000**	**2.267.559.000**	**1.490.000.000**	**-**	**1.227.327.220**	**1.979.146.461**	**2.141.713.008**	**1.422.856.337**	**-**	**97,03**	**99,46**	**94,45**	**95,49**	**1.402.443.796**	**77,29**
6.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	118.446.000	428.942.580	500.000.000	720.380.700	800.000.000	117.908.300	428.942.580	500.000.000	718.602.568	735.002.505	99,54	100	99,90	99,75	91,88	513.553.856	98,21

	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
6.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	64.266.000	203.300.000	340.160.000	100.000.000	-	64.266.000	202.256.300	340.143.202	99.823.416	-	100	99,49	100	99,82	141.545.200	79,86
6.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.164.400	6.791.400	286.500.000	246.555.500	100.000.000	215.332.882	6.338.640	286.418.033	146.531.438	99.823.418	99,61	93,33	99,97	59,43	99,14	171.202.260	90,30
6.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi	--	764.860.000	1.000.000.000	960.462.800	490.000.000	-	727.780.000	990.950.000	936.435.800	488.895.000	-	95,15	99,10	97,50	99,77	643.064.560	78,30

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol antara lain :

1. Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota
2. BPS, BNN Provinsi Jambi
3. KPU dan Banwaslu Provinsi Jambi
4. Polda dan Korem 042 Garuda Putih Jambi
5. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Jambi
8. Partai Politik
9. Organisasi Kemasyarakatan

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana pemerintahan yang beragam suku, ras, agama dan budaya berdampak meningkatnya potensi konflik. Konflik yang terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik lahan, konflik sumber daya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA.

Dari permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasikan sebagai Tantangan dan Peluang yang dihadapi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain :

1. Kondisi Politik.

   Permasalahan Politik secara Nasional secara tidak langsung berdampak terhadap Kondisi politik di Provinsi Jambi,

   a. Pendidikan politik

      Pendidikan Politik merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jambi tahun 2021-2026 pendidikan politik masih ditujukan untuk kalangan pemilih pemula yang baru akan berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan pemilih perempuan yang masih banyak

beranggapan bahwa politik itu tidak penting dan merupakan urusan para kaum lelaki. Maka dari itu untuk menghilangkan stigma tersebut, untuk pendidikan politik lebih diarah kan pada pemahaman mengenaiesensi ilmu politik, etika politik, dan perkembangan budaya politik saat ini, serta aturan-aturan baru yang terkait dengan partai politik dan pemilihan umum.

b. Partisipasi masyarakat dalam pemilu

Mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu, jika dilihat dari persentase partisipasi masyarakat pada saat pemilihan umum legislatif dan presiden, dan pada saat pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dalam 2 periode terakhir persentasenya naik turun. Pada pemilihan umum legislatif dan presiden pada tahun 2014 mencapai 77,2% (untuk pileg) dan 70,6% (untuk pilpres), sedangkan pada saat pilgub 2015 turun menjadi 67,8%. Pada saat pileg dan pilpres tahun 2019 naik kembali mencapai 81,77 % melebihi target nasional 77,5%, namun pada pilgub tahun 2020 turun lagi menjadi 67,9%. Jika dikelompokkan masing-masing, pada dasar nya persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sehingga usaha menaikkan partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil walaupun belum sempurna. Fenomena naik turunnya partisipasi masyarakat pada saat pileg pilpres dengan pilgub ini masih menjadi permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya, sehingga untuk pemilu yang selanjutnya hal tersebut tidak terjadi, dan dapat stabil mengalami kenaikan dengan target dapat memenuhi target nasional baik itu untuk pileg pilpres maupun pilgub yang akan datang.

2. Kondisi Wawasan Kebangsaan.

Cara pandang masyarakat mengartikan pentingnya Rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) sudah mulai luntur, juga masih terdapat perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam berkeyakinan sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan antar agama, suku dan etnis.

3. Kondisi Organisasi Kemasyarakatan.

   Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi khususnya pada Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan dimana untuk meningkatkan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerjasama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga niraba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

   Kondisi sosial budaya : masih terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional yang diikuti meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI. Sehingga makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Provinsi Jambi yang agamis dengan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

4. Kondisi Keamanan

   Permasalahan keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi secara keseluruhan termasuk dalam kategori aman dan terkendali, ruang lingkup penanganan konflik sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, meliputi:

1. Pencegahan Konflik.
2. Penghentian Konflik.
3. Pemulihan Paska konflik.

Adapun potensi konflik sosial terdiri dari :

1. Konflik yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Konflik yang berkaitan dengan perseteruan antar suku, antar umat beragama, antar etnis dan antar umat beragama.
3. Konflik yang berkaitan dengan batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/ atau Provinsi.
4. Konflik yang berkaitan dengan sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau anatar masyarakat dengan pelaku usaha.
5. Konflik yang berkaitan dengan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun konflik yang banyak terjadi di daerah Provinsi Jambi meliputi konflik agama, suku dan ras, konflik sengketa lahan, dan konflik politik. Sehingga perlu diadakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah.

Upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan :

a. Memelihara kondisi yang damai dalam masyarakat.
b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.
c. Memecah potensi konflik.
d. Membangun sistem penyelesaian secara damai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

a. Pelayanan Internal

1) Penyusunan program Badan;
2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
4) Penyusunan laporan Badan;
5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
9) Pengelolaan kearsipan;
10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan.

b. Pelayanan Eksternal

1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
3) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri (TIMDU);
4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

7) Fasilitasi layanan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan;

8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, serta bela negara.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Kondisi lingkungan kerja yang tentunya dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanan tugas pokok dan fungsi, program kerja Badan/instansi serta stakeholder guna terwujudnya visi pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program Pembangunan menuju Jambi MANTAP 2025-2030.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dari Tahun 2021 sampai dengan 2025, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

a. Masih perlunya peningkatan kualitas pembinaan aktivitas, hubungan politik dan pendidikan politik, yang bermuara pada partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Jambi;
b. Masih Perlunya peningkatan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Perlunya mengikut sertakan kapasitas Ormas dalam pembangunan Daerah di Provinsi Jambi;
d. Memfasilitasi konflik sosial yang ada di daerah Provinsi Jambi;
e. Masih terdapatnya aksi peyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasisosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

Telaahan Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2025-2030 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat (Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi) pada tanggal 9 Januari 2025. Dimana Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2025 – 2030 adalah :

"TERWUJUDNYA JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT"

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025 – 2030 antara lain :

MISI PERTAMA : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

MISI KEDUA : **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata,** yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan

serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

MISI KETIGA : **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi,sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Pertama** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

"Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"

Dari misi pertama tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis e-government melalui penerapan SPBE yang terintegrasi, berintegritas dengan pelayanan publik prima. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu :

1. Prorgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.6 Isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia di bangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbul nya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin

merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Jambi, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah.

   Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah.

   Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan.

   Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

3) Kurangnya Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.

   Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal*(conflict and communal violence)* di tengah masyarakat, seper tisengketa lahan, tawuranan tarsuku/warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negative dengan muncul nya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada saat ini dan beberapa permasalahan diatas serta melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri. Isu isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula;
2. Masih perlunya peningkatan Wawasan Kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air dalam memeperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam wadah kesatuan bangsa dan politik;
3. Perlunya peningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan daerah;
4. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi;
5. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.

6. Meningkatkan pengakuan persamaan derajad, kewajiban dan hak azasi manusia tampa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial atau warna kulit;
7. Meningkatkan upaya penyelesaian perselisihan secara damai dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
8. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan kearah dalam rangka menekan potensi konflik;
9. Perlunya penelitian pemetaan wilayah potensi konflik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

1. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta memecahkan permasalahan dalam menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029, yaitu :

"Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis Berdasarkan Pancasila Dan Berwawasan Kebangsaan"

2. Sasaran

Sebagai sasaran dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029, yaitu :

"Meningkatnya Penegakkan Demokrasi, Harmonisasi Sosial, Wawasan Kebangsaan Dan Stabilitas Daerah Yang Kondusif"

Pada Tabel berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 3.11
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan		Indeks Demokrasi							BPS Prov. Jambi
		Meningkatnya penegakan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Indeks Aspek Kebebasan	60,88	66,50	67,00	67,50	67,80	68,00	
			Indeks Aspek Kesetaraan	92,45	77,50	78,00	78,30	78,60	78,80	
			Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	85	81,30	81,60	81,80	82,00	82,20	

Sesuai dengan publikasi BPS Provinsi Jambi, IDI Provinsi Jambi tahun 2021 menggunakan metode baru mencapai angka 72,91, untuk tahun 2022 dengan angka 77,19. Sedangkan capaian (kondisi saa ini) IDI Provinsi Jambi tahun 2023, dengan angka capaian 74,47 poin. Angka tersebut lebih rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu 79,46 poin.

Untuk tahun 2024, target capaian IDI Provinsi Jambi dengan angka 74,66. Selanjutnya tahun 2025 dengan angka 75,18, diakhir tahun renstra target capaian IDI Provinsi Jambi dengan angka 75,66.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam periode 2025-2029 menuju Jambi MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT. Dalam tabel berikut disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Tabel 3.12

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Terwujudnya Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan	Meningkatnya penegakkan demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Meningkatkan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, wawasan kebangsaan dan stabilitas daerah yang kondusif	Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap penegakkan demokrasi serta pembinaan Ipoleksosbudkumham

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam periode 2025-2029.

Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan pengukuran pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan.
2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah.
3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu:

1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
2) Peningkatakan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM
3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi, menguatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi dalam tahun berjalan dengan menggunakan metode baru *(aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi)* serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

4.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtiar Realisasi Kinerja SKPD
   3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

b. Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilatasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Kerakter Kebangsaan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakrter Kebangsaan.
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
   3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
   4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
6) Pembentukan Paskibraka

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
   2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
   3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
   4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
4) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
   2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
   3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
   4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
   5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Tabel 4.13
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**24.203.400.000**		**27.251.100.000**		**30.443.700.000**		**38.357.800.000**		**41.481.270.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Pelayanan Publik yang prima**		**90 %**	**10.364.900.000**	**91%**	**11.607.600.000**	**92%**	**11.798.200.000**	**93%**	**11.057.800.000**	**95%**	**12.236.270.000**	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	**Nilai AKIP**	**71,75**	**72,5**		**73**		**74**		**75**		**80**		Nilai
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**85**	**87**	**10.100.000**	**88**	**11.100.000**	**89**	**12.200.000**	**90**	**13.400.000**	**91**	**14.700.000**	Indeks
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik katagori PD	**58,8**	**71**		**72**		**73**		**74**		**75**		Nilai
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**390.000.000**	**100 %**	**429.500.000**	**100 %**	**471.600.000**	**100 %**	**520.700.000**	**100 %**	**545.400.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	5 Dok	125.000.000	5 Dok	137.500.000	5 dok	151.200.000	5 dok	166.300.000	5 dok	182.900.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5 laporan	240.000.000	5 lap	264.000.000	5 lap	290.400.000	5 lap	319.400.000	5 lap	322.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5 lap	25.000.000	5 lap	28.000.000	5 lap	30.000.000	5 lap	35.000.000	5 lap	40.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**95 %**	**100 %**	**8.480.000.000**	**100 %**	**8.510.500.000**	**100 %**	**8.536.500..000**	**100 %**	**8.565.600.000**	**100 %**	**8.595.600.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org	50 org	8.000.000.000	50 org	8.000.000.000	55 org	8.000.000.000	60 org	8.000.000.000	65 org	8.000.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	16 dok	230.000.000	16 dok	260.500.000	16 dok	286.500.000	16 dok	315.100.000	16 dok	346.600.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	12 dok	100.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	64 dok	100.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase tertatanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100 %**	**93.000.000**	**100 %**	**116.200.000**	**100 %**	**127.800.000**	**100 %**	**140.500.000**	**100 %**	**154.470.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	82 paket	51.000.000	82 paket	70.000.000	82 paket	77.000.000	82 paket	84.700.000	82 paket	93.170.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/ pelatihan	14 orang	14 orang	42.000.000	14 orang	46.200.000	14 orang	50.800.000	14 orang	55.800.000	14 orang	61.300.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 %**	**100 %**	**414.200.000**	**100 %**	**455.600.000**	**100 %**	**500.100.000**	**100 %**	**550.100.000**	**100 %**	**600.100.000**	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	41.100.000	1 paket	43.700.000	1 paket	48.000.000	1 paket	52.800.000	1 paket	58.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	63.300.000	1 paket	72.500.000	1 paket	79.700.000	1 paket	87.600.000	1 paket	96.300.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	7.500.000	12 dok	8.200.000	12 dok	9.000.000	12 dok	9.900.000	12 dok	10.800.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	10 lap	75.000.000	10 lap	82.500.000	10 lap	97.700.000	10 lap	100.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 lap	414.200.000	4 lap	455.600.000	4 lap	500.100.000	4 lap	550.100.000	4 lap	600.100.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan kebutuhan BMD**	100 %	100 %	**178.000.000**	100 %	**1.230.000.000**	100 %	**1.250.000.000**	100 %	**330.000.000**	100 %	**1.310.000.000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Mobil 12 Motor	-	-	1 mobil 2 motor	500.000.000	1 Mobil 2 Motor	500.000.000	-	-	1 mobil 2 mobil	500.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Opraasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Mobil		-	1 Mobil	450.000.000	1 mobil	450.000.000		-	1 mobil	450.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	22 unit	178.000.000	22 unit	280.000.000	22 unit	300.000.000	22 unit	330.000.000	22 unit	360.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersedian jasa penunjang urusan kantor	95 %	95 %	**207.500.000**	95 %	**217.500.000**	95 %	**222.000.000**	95 %	**228.000.000**	95 %	**240.000.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 lap	20.500.000	1 lap	20.500.000	1 lap	22.000.000	1 lap	23.000.000	1 lap	25.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 lap	133.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	140.000.000	4 lap	145.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 lap	54.000.000	4 lap	57.000.000	4 lap	60.000.000	4 lap	65.000.000	4 lap	70.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	100 %	**592.100.000**	100 %	**637.200.000**	100 %	**678.000.000**	100 %	**710.000.000**	100 %	**775.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	295.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	310.000.000	20 unit	320.000.000	20 unit	350.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	35 unit	87.100.000	40 unit	87.200.000	45 unt	88.000.000	50 unit	90.000.000	55 unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 unit	2 unit	210.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	280.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	325.000.000	

	Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi												
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN **Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**76%**	**78%**	**6.055.000.000**	**79%**	**7.055.000.000**	**80%**	**8.215.000.000**	**81%**	**14.120.000.000**	**82%**	**15.195.000.000**	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI**	**76%**	**78%**	**6.055.000.000**	**79%**	**7.055.000.000**	**80%**	**8.215.000.000**	**81%**	**14.120.000.000**	**82%**	**15.195.000.000**	
Penyusunan Program Kerja di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	5 dokumen	60.000.000	5 dok	60.000.000	5 dok	250.000.000	5 dok	350.000.000	5 dok	375.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dok	3 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	250.000.000	4 dok	5.000.000.000	4 dok	5.000.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 org	150 org	2.500.000.000	150 org	3.000.000.000	150 org	3.500.000.000	150 org	4.000.000.000	150 org	4.500.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang	210 orang	565.000.000	300 orang	565.000.000	330 orang	350.000.000	400 orang	400.000.000	420 orang	420.000.000	

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 lap	6 lap	350.000.000	6 lap	350.000.000	6 lap	365.000.000	6 lap	370.000.000	6 lap	400.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	150 org	2.500.000.000	150 org	3.000.000.000	150 org	3.500.000.000	150 org	4.000.000.000	150 org	4.500.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK **Meningkatnya Etika dan Budaya politik**	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**100%**	**100%**	**3.215..000.000**	**100%**	**3.385.000.000**	**100%**	**4.540.000.000**	**100%**	**6.500.000.000**	**100%**	**6.700.000.000**	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase terlaksana Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100%**	**100%**	**3.215.000.000**	**100%**	**3.385.000.000**	**100%**	**4.540.000.000**	**100%**	**6.500.000.000**	**100%**	**6.700.000.000**	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	6 dok	150.000.000	6 dok	200.000.000	6 dok	250.000.000	6 dok	300.000.000	6 dok	350.000.000	

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1 dok kebijakan	100.000.000	1 dok kebijakan	150.000.000	1 dok kebijakan	200.000.000	1 dok kebijakan	250.000.000	1 dok kebijakan	300.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 org	100 org	2.500.000.000	100 org	2.500.000.000	100 org	3.500.000.000	100 org	5.200.000.000	100 org	5.200.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72 org	100 org	315.000.000	100 org	335.000.000	100 org	340.000.000	100 org	400.000.000	100 org	450.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	4 lap	5 lap	150.000.000	5 lap	200.000.000	5 lap	250.000.000	5 lap	350.000.000	5 lap	400.000.000	

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN **Meningkatnya ketertiban Organisasi Masyarakat**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**90%**	**92%**	**1.473.500.000**	**93%**	**1.271.000.000**	**94%**	**2.065.000.000**	**95%**	**2.465.000.000**	**96%**	**2.590.000.000**	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasanorganisasi kemasyarakatan**	**91%**	**92%**	**1.473.500.000**	**93%**	**1.271.000.000**	**94%**	**2.065.000.000**	**95%**	**2.465.000.000**	**96%**	**2.590.000.000**	
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 dok	5 dok	207.000.000	5 dok	250.000.000	5 dok	320.000.000	5 dok	380.000.000	5 dok	400.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	5 kebijakan	100.000.000	5 kebijakan	150.000.000	5 kebijakan	200.000.000	5 kebijakan	250.000.000	5 kebijakan	300.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	60 org	931.500.000	60 org	1.000.000.000	60 org	1.150.000.000	60 org	1.350.000.000	60 org	1.350.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang PendaftaranOrmas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas & Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	60 org	100.000.000	60 org	150.000.000	60 org	200.000.000	60 org	250.000.000	60 org	300.000.000	

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 lap	5 lap	135.000.000	5 lap	171.000.000	5 lap	195.000.000	5 lap	235.000.000	5 lap	240.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA **Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat**	**Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan**	**75%**	**77%**	**890.000.000**	**78%**	**1.010.000.000**	**79%**	**1.130.000.000**	**80%**	**1.190.000.000**	**81%**	**1.120.000.000**	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang KetahananEkonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasiKUB dan penghayat kepercayaan**	**75%**	**77%**	**890.000.000**	**78%**	**1.010.000.000**	**79%**	**1.130.000.000**	**80%**	**1.190.000.000**	**81%**	**1.120.000.000**	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	6 dok	6 dok	110.000.000	6 dok	120.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	180.000.000	6 dok	200.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	-	5 kebijakan	120.000.000	5 kebijakan	170.000.000	5 kebijakan	175.000.000	5 kebijakan	180.000.000	5 kebijakan	20.000.000	

	Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun												
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 org	50 org	482.000.000	50 org	500.000.000	50 org	540.000.000	50 org	560.000.000	50 org	600.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	55 org	58.000.000	55 org	70.000.000	55 org	90.000.000	55 org	95.000.000	55 org	100.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi KerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	5 lap	120.000.000	5 lap	150.000.000	5 lap	175.000.000	5 lap	175.000.000	5 lap	200.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL **Meningkatnya penanganan konflik social yang diselesaikan**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**78%**	**79%**	**2.205.000.000**	**79,5%**	**2.472.500.000**	**80%**	**2.695.500.000**	**80,5%**	**3.025.000.000**	**81%**	**3.640.000.000**	Persentase
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan**	**78%**	**79%**	**2.205.000.000**	**79,5%**	**2.472.500.000**	**80%**	**2.695.500.000**	**80,5%**	**3.025.000.000**	**81%**	**3.640.000.000**	

	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	6 dok	130.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	170.000.000	6 dok	180.000.000	6 dok	200.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	12 Dok	100.000.000	12 Dok	120.000.000	12 dok	150.000.000	12 Dok	275.000.000	12 Dok	275.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KewaspadaanDini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 org	100 org	500.000.000	100 org	520.000.000	100 org	600.000.000	100 org	620.000.000	100 org	650.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	20 org	50 org	75.000.000	50 org	82.500.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	115.000.000	

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 lap	11 lap	150.000.000	11 lap	250.000.000	11 lap	275.500.000	11 lap	350.000.000	11 lap	400.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	10 dok	10 dok	1.250.000.000	10 dok	1.350.000.000	10 dok	1.400.000.000	10 dok	1.500.000.000	10 dok	2.000.000.000	

Tabel 4.14
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Berpolitik yang Demokratis	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Ormas	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas FKUB, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya kondisi kinerja di akhir periode RPJMD maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat dikatakan berhasil dalam menyumbang salah satu poin keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) periode.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan misi Pemerintahan Provinsi Jambi difokuskan pada misi ke tiga yaitu ;

”Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan

Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dari misi di atas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang ada. Tujuan - tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang dari tujuan tersebut. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian di implementasikan ke dalam bentuk indikator kinerja sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah. Indikator sasaran yang ada di RPJMD tersebut kemudian dikoneksikan dengan indikator sasaran Perangkat Daerah melalui Renstra PD. Dengan demikian, terdapat kesenyawaan dan kesatuan program-program yang ada di RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Renstra PD.

Pada tabel di bawah ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian serta Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.15
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Aspek Kebebasan	%	60,88	66,50	67,00	67,50	67,80	68,00	BPS Prov. Jambi
2.	Indeks Aspek Kesetaraan	%	92,45	77,50	78,00	78,30	78,60	78,80	
3.	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	85	81,30	81,60	81,80	82,00	82,20	

Tabel 4.16
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai AKIP	Nilai	72,25	72,5	73	74	75	80	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86	87	88	89	90	91	
2.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	77%	78%	79%	80%	81%	82%	
3.	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	
5.	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,social,budaya dan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	76%	77%	78%	79%	80%	81%	
6.	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	78,5%	79%	79,5%	80%	80,5%	81%	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral dari perencanaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Provinsi Jambi.

Dengan demikian keberadaan Renstra OPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD merupakan pedoman penting dan mendasar bagi OPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan. Dalam Renstra ini ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jambi yang mengalami revisi atau perubahan. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

Jambi, 15 Oktober 2025
KEPALA BADAN,

Drs. H. ISMED WIJAYA , M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19701025 199003 1 002